



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



EFEKTIVITAS SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA  
MENGUNAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN KONVENSIIONAL

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

DISUSUN OLEH:  
NESSY CINTIARA ZULNI  
2004411014

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024

LAPORAN SKRIPSI TERAPAN



EFEKTIVITAS SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA  
MENGUNAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada  
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik  
Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**  
Disusun Oleh :  
NESSY CINTIARA ZULNI

2004411014

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Nesy Cintiara Zulni

NIM : 2004411014

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Agustus 2024

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nesy Cintiara Zulni  
NIM : 2004411014  
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Annisa Alifa Ramadhani, S.E., M.Si. (  )

Anggota Penguji : Ida Syafrida S.E., M.Si. (  )

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Agustus 2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nesy Cintiara Zulni  
Nomor Induk Mahasiswa : 2004411014  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ D4-Keuangan dan Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Disetujui oleh:  
Pembimbing

Ida Syafrida, S.E., M.Si.

NIP. 197602042005012001

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Diketahui Oleh:  
Kepala Program Studi

Nurul Hasanah, S.ST., M.Si.

NIP. 199201122018032001

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nesy Cintiara Zulni  
NIM : 2004411014  
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 6 Agustus 2024

Nesy Cintiara Zulni

NIM.2004411014



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alaamiin segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada hambanya. Shalawat serta salam yang selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, suri tauladan umat muslim. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak.

Dengan segala usaha, doa, dan kerja keras yang telah dilakukan sehingga skripsi ini dengan judul “Analisis Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah dan Konvensional” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Nurul Hasanah, S.ST.,M.Si., selaku Kepala Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah.
4. Ibu Ida Syafrida, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, masukan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan sangat sabar dan baik.
5. Ibu Annisa Alifa Ramadhani, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini serta telah menguji skripsi dengan sabar dan baik.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi terkhusus dosen program studi Keuangan dan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
7. Bapak Nasrun dan Ibu Lussy Purnama Sari selaku kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do’a yang tak pernah putus sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Bapak Nasrun, SH; Bapak Raden An'an Andri Hikmat SR, AP, MM; Ibu Mirni Sumiyati S.E., M.S.E; Ibu Herteti Rospelita, S.Kom, M.Si; Ibu Watok V Worang, S.E; dan Ibu Yosita Nur Wirdayanti, ST, MBA., MIFP selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya melakukan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Angkatan 2020 terkhusus Misyelia Fahrani, Sabbit Safaana, dan Wandri Ichsan atas segala bantuan, semangat, waktu, dan dukungan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
10. Sepupuku, Leyta Lovmanya. Terimakasih atas waktu dan bantuannya untuk berdiskusi dari awal penyusunan skripsi.
11. Partnerku, Irqi Saputra. Terimakasih atas semangat, waktu dan bantuannya untuk berdiskusi dan menghibur sejak awal hingga selesai penyusunan skripsi.
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki penelitian ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan terkhususnya mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta.

Depok, 6 Agustus 2024

Penulis

Nessy Cintiara Zulni

NIM 2004411014



## Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

Nessy Cintiara Zulni  
Keuangan dan Perbankan Syariah

### ABSTRAK

Pemerintah menerapkan skema alternatif KPBU untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang tinggi dan keterbatasan anggaran, baik menggunakan pembiayaan syariah atau konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menggunakan pembiayaan syariah dan konvensional. Metode penelitian ini menggunakan *Mix Method* yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara studi pustaka, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis kualitatif dilakukan menggunakan indikator kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan keterkaitan antar sektor infrastruktur. Analisis Kuantitatif dilakukan menggunakan indikator analisis biaya manfaat dan sosial (*Net Present Value* dan *Internal Rate of Return*), dan analisis keuangan (*Discounted Payback Period*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kesesuaian dengan RPJMN, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, dan keterkaitan antar sektor infrastruktur tidak dapat dijadikan pengukur efektivitas dua proyek dengan jenis pembiayaan berbeda serta proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan lebih efektif berdasarkan waktu pembiayaannya sedangkan proyek Jalan Tol Serpong-Balaraja lebih efektif berdasarkan besar marginnya. Hasil penelitian memiliki implikasi yang luas, baik bagi pelaku usaha atau pemerintah seperti pengembangan model pembiayaan dalam KPBU, peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh KPBU, dan perumusan kebijakan.

Kata Kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Proyek Infrastruktur, Pembiayaan Syariah.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## *Effectiveness of Public-Private Partnership Infrastructure Schemes Using Sharia and Conventional Financing*

Nessy Cintiara Zulni  
*Sharia Finance and Banking*

### **ABSTRACT**

*The government implements an alternative PPP scheme to meet high infrastructure needs and budget constraints, using either sharia or conventional financing. This study aims to determine the effectiveness of the Public Private Partnership (PPP) scheme using sharia and conventional financing. This research method uses the Mix Method, a combination of quantitative and qualitative methods. The types of data used are primary data from interviews with informants and secondary data. The data collection method in this study was through literature studies, in-depth interviews, and documentation studies. Qualitative analysis was carried out using indicators of conformity with National Medium-Term Development Plan (National RPJM), conformity with the Spatial and Regional Plan, and the relationship between infrastructure sectors. Quantitative analysis was carried out using indicators of cost-benefit and social analysis (Net Present Value and Internal Rate of Return), and financial analysis (Discounted Payback Period). The results of this study indicate that the indicators of conformity with the RPJMN, conformity with the Spatial and Regional Plan, and the relationship between infrastructure sectors cannot be used as a measure of the effectiveness of two projects with different types of financing and the Preservation of the East Sumatra Cross-Island Road, South Sumatra Section project is more effective based on the financing time while the Serpong-Balaraja Toll Road project is more effective based on the size of its margin. The results of the study have broad implications, both for business actors or the government such as the development of financing models in PPP, improving the quality of products produced by PPP, and policy formulation.*

*Keywords: Public Private Partnership (PPP), Infrastructure Project, Sharia Financing*

#### **Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Efektivitas.....	8
2.1.2 Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.....	8
2.1.3 Pembangunan Infrastruktur.....	11
2.1.4 Pembiayaan Infrastruktur .....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Berfikir.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Metode Penelitian.....	23
3.2 Jenis Data .....	23
3.3 Subjek dan Objek Penelitian .....	23

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.3.1	Subjek Penelitian .....	23
3.3.2	Objek Penelitian .....	24
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.5	Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>29</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	29
4.1.1	Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan ....	29
4.1.2	Pembangunan Jalan Toll Serpong-Balaraja .....	30
4.2	Hasil Penelitian.....	31
4.2.1	Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.....	31
4.2.2	Kendala dan Upaya Mengatasi Dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah. ....	40
4.3	Analisis Penelitian .....	44
4.3.1	Analisis Indikator Pengukuran Efektivitas .....	44
4.3.2	Analisis Kendala dan Upaya Mengatasi Dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah. ....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>50</b>
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>52</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kesesuaian Prinsip Syariah Dengan PPP.....	3
Tabel 1. 2 Persentase Pembiayaan Syariah Pada PT.Sarana Multi Infrastruktur....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4. 1 Analisis Biaya Manfaat Sosial .....	38
Tabel 4. 2 Analisis Keuangan ( <i>Discounted Payback Period</i> ).....	39





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan dalam KPBU.....	10
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir.....	21



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Wawancara .....	58
Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri .....	59
Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	63
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri .....	67
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber .....	69
Lampiran 6. Surat Permohonan Penelitian untuk Melaksanakan Wawancara .....	71



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia diakui sebagai negara berkembang yang memiliki kemampuan untuk terus berkembang dengan laju yang cukup tinggi. Dikutip dari laporan Pricewaterhousecoopers, disebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) yang dimiliki Indonesia masuk dalam peringkat 6 di dunia pada tahun 2030 dan diproyeksikan naik 2 peringkat menjadi peringkat 4 pada tahun 2050 (Pricewaterhousecoopers, 2017). Berdasarkan *Index of Multiple Deprivation (IMD) Global Competitiveness Index* tahun 2023 Indonesia menempati peringkat 34 yang menunjukkan kenaikan 10 peringkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini membuktikan Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dari sisi kinerja ekonomi, infrastruktur, efisiensi pemerintahan, dan efisiensi bisnis (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, pemerintah memperkirakan adanya kebutuhan pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.445 Triliun. Kebutuhan infrastruktur ini diperkirakan meningkat sebesar 34,3% jika dibandingkan dengan tahun 2015-2019 sebesar Rp4.796 Triliun. Kebutuhan infrastruktur yang meningkat ini mencerminkan ekspansi APBN dari tahun ke tahun dengan sisi belanja yang meningkat pesat (Kementerian Keuangan, n.d.).

Di sisi lain, peningkatan belanja tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan dengan tingkat yang kurang lebih sama, sehingga meningkatkan tekanan pada defisit. Sebagaimana data yang didapat melalui Informasi APBN 2023 (Kementerian Keuangan, 2023), pendapatan yang diterima negara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.699,9 triliun dengan belanja negara sebesar Rp 2.739,2 triliun. Pada tahun 2021, pendapatan yang diterima negara sebesar Rp 1.743,6 triliun dengan belanja negara sebesar Rp 2.750,0 triliun. Pada tahun 2022, pendapatan yang diterima negara sebesar Rp 1.846,1 triliun dengan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun. Pada Tahun 2023, pendapatan yang diterima negara sebesar Rp 2.463,0 triliun dengan belanja negara sebesar Rp 3.061 triliun.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kondisi APBN tersebut tidak hanya menyebabkan defisit pada anggaran tetapi juga meningkatkan besaran keseimbangan primer negatif (*negative primary balance*). *Primary balance* yang negatif ini menjadi tanda bahwa neraca anggaran pada APBN dalam kondisi yang buruk sehingga perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki kualitasnya (Badan Kebijakan Fiskal, n.d.).

Dengan melihat tantangan-tantangan anggaran dan tingginya tingkat kebutuhan infrastruktur Indonesia, pemerintah harus mengalihkan pendanaan infrastruktur yang sepenuhnya menggunakan uang negara seperti APBN atau APBD menuju ke langkah strategis untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Menurut Kementerian Keuangan, salah satu alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah melibatkan sektor swasta dalam negeri atau luar negeri dengan menerapkan *Public-Private Partnership* (PPP), atau ditranslasikan sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (Kementerian Keuangan, 2024).

Dengan berkembangnya penerapan skema syariah di Indonesia, pendanaan KPBU tidak hanya menggunakan skema perbankan konvensional tetapi juga menggunakan skema perbankan syariah. Berdasarkan *Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Projects Plan In Indonesia 2023*, didapatkan data bahwa pemerintah sudah menjalankan 34 proyek infrastruktur dengan skema KPBU baik dengan pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah. Proyek infrastruktur skema KPBU dengan pembiayaan konvensional adalah PLTU Batang, Pelabuhan Anggrek, Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Kota Bekasi, Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru, Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat, Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bandar Lampung, Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan, Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I, Sistem Penyediaan Air Minum Nambo, Jalan Toll Manado – Bitung, Jalan Toll Pandaan – Malang, Jalan Toll Jakarta – Cikampek II Elevated, Jalan Toll Batang – Semarang, Jalan Toll Cileunyi – Sumedang – Dawuan, Jalan Toll Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Jalan Toll Balikpapan – Samarinda, Jalan Toll Semarang – Demak, Jalan Toll Serang – Panimbang, Jalan Toll Probolinggo – Banyuwangi, Palapa Ring Paket Timur, Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, Penggantian Jembatan Callender Hamilton Jalan Utama Pulau Jawa, Jalan


**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Toll Serpong – Balaraja, Jalan Toll Jakarta – Cikampek II Selatan, Jalan Toll Yogyakarta-Bawen, Jalan Toll Solo - Yogyakarta – Kulonprogo, Multi Lane Free Flow Toll Transaction System, Jalan Toll Gilimanuk – Mengwi, dan Proyek Satelit Multifungsi. Proyek infrastruktur skema KPBU dengan pembiayaan syariah adalah Perkeretaapian Makassar-Parepare, Alat Penerangan Jalan Kota Madiun, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan, Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Riau (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

Menurut *The World Bank* (2017) *Mobilizing Islamic Finance for Infrastructure Public Private Partnership Report 2017*, prinsip-prinsip dasar syariah memiliki kesesuaian dengan *Public Private Partnership* sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Kesesuaian Prinsip Syariah Dengan PPP

Prinsip Syariah	Proyek <i>Public Private Infrastructure</i>
Pengembalian harus dikaitkan dengan profit dan berasal dari risiko komersial yang diambil oleh pemilik modal.	Proyek PPP memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek untuk membagi risiko.
Pemodal Islam menjadi mitra dalam proyek.	Pemodal Islam dapat menjadi mitra dalam proyek
Transaksi bebas dari ketidakpastian ( <i>gharar</i> ) atau perjudian ( <i>maysir</i> )	Dalam perencanaan proyek telah diperhitungkan segala hal yang berkaitan, sehingga bebas dari ketidakpastian.
Tidak diperbolehkan investasi yang berkaitan dengan alkohol, narkoba, perjudian, senjata, dan hal lain yang dilarang.	Proyek infrastruktur tidak mencakup bidang-bidang yang dilarang.

Sumber : *World Bank* (2017)

Pembiayaan syariah pada *Public Private Partnership* telah berhasil digunakan dalam pembangunan infrastruktur di banyak negara seperti pembangunan Queen Alia International Airport di Jordan, Karachi Thatta Dual



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Carriageway di Pakistan, Doraleh Container Terminal di Djibouti, Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport di Arab Saudi, Master Wind Energy Limited di Pakistan, Liberty Powertech Limited di Pakistan, The East Klang Valley Expressway Project di Malaysia, dan Konya Integrated Health Campus di Turki. Keberhasilan ini menjadi dasar untuk terus mencari pembiayaan syariah sebagai sumber pembiayaan untuk proyek dengan skema PPP (The World Bank, 2017).

Berdasarkan *Public Private Partnership Infrastructure Projects Plan In Indonesia 2023*, didapatkan data bahwa pemerintah sudah menjalankan 34 proyek KPBU, namun hanya 4 proyek KPBU yang menggunakan pembiayaan syariah (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Hal ini sejalan dengan data dari laporan tahunan PT.Sarana Multi Infrastruktur sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan sektor pembangunan infrastruktur, bahwa masih rendahnya pembiayaan syariah yang dihimpun untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Tabel 1. 2 Persentase Pembiayaan Syariah Pada PT.Sarana Multi Infrastruktur

Tahun	Pembiayaan Syariah		Pinjaman Diberikan (Non-Syariah)		Total
	Rp	%	Rp	%	
2020	Rp 2.402.153	4%	Rp 64.347.768	96%	Rp 66.744.921
2021	Rp 3.161.077	4%	Rp 73.101.621	96%	Rp 76.262.699
2022	Rp 6.600.515	7%	Rp 83.877.944	93%	Rp 90.478.459
2023	Rp 8.629.437	10%	Rp 79.203.289	90%	Rp 87.832.726

Sumber : Laporan Tahunan PT.Sarana Multi Infrastruktur

Penerapan skema syariah dihadapi berbagai macam isu keefektifan seperti kurangnya koordinasi pemerintah dan otoritas terkait, keterbatasan dalam menyediakan pembiayaan yang memadai untuk infrastruktur, produk yang tidak variatif, proses pengambilan keputusan yang lambat, biaya dana yang mahal, dan *maturity mismatch gap* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Skema syariah memiliki kesesuaian dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta yang telah terbukti dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur di banyak negara. Namun, di Indonesia masih sedikit proyek pembangunan infrastruktur KPBU yang menggunakan pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh isu keefektifan yang dihadapi oleh skema syariah. Dengan demikian, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah dan Konvensional”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Seiring dengan kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahunnya, pemerintah melibatkan sektor swasta melalui penerapan skema *Public Private Partnership* (PPP), atau ditranslasikan sebagai skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu alternatif pendanaan proyek infrastruktur. Menurut *World Bank* dalam *Mobilizing Islamic Finance for Infrastructure Public Private Partnership Report 2017*, dengan potensi dan kesesuaiannya, skema syariah sangat tepat untuk diterapkan dalam PPP. Namun, nyatanya hingga tahun 2023 hanya 4 proyek KPBU yang menggunakan pembiayaan syariah dari total 34 proyek yang telah dijalankan. Hal ini sejalan dengan data dari laporan tahunan PT.Sarana Multi Infrastruktur bahwa persentase pembiayaan syariah setiap tahunnya tidak lebih dari 10%. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020), rendahnya penggunaan pembiayaan syariah dalam pembangunan infrastruktur disebabkan oleh skema syariah yang dihadapkan dengan isu keefektifan. Oleh sebab itu, fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menggunakan pembiayaan syariah yang diharapkan dapat membuktikan potensi dan kesesuaiannya.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan tentang rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan menggunakan pembiayaan syariah dan konvensional?



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana upaya mengatasinya dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan menggunakan pembiayaan Syariah dan upaya?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan menggunakan pembiayaan syariah dan konvensional.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan menggunakan pembiayaan syariah.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengetahuan yang digunakan sebagai acuan teori penelitian oleh akademisi pada penelitian selanjutnya dalam studi pada skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, yaitu Manajemen Bank Syariah, Investor, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah.

#### 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat agar penelitian dapat mudah dipahami dan memberikan gambaran secara sederhana mengenai penelitian yang dibahas. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara berurutan sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan berisikan perihal latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang landasan teori, penelitian relevan atau terdahulu, dan kerangka pemikiran dalam penelitian.

Pada Bab III Metodologi Penelitian menjabarkan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, jenis data penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan berisikan gambaran umum lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian dan analisis data penelitian.

Pada Bab V berisikan penutup yang terdiri atas kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat disampaikan terkait hasil penelitian.

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka terdapat beberapa kesimpulan penelitian yaitu :

1. Pengukuran efektivitas skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan pembiayaan syariah dan konvensional dilihat dengan menggunakan lima indikator pengukuran. KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan dan KPBU Jalan Tol Serpong-Balaraja telah terbukti keefektifannya karena memenuhi tiga indikator, yaitu indikator kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), indikator kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), dan indikator keterkaitan antar sektor infrastruktur meskipun ketiga indikator tersebut tidak bisa dijadikan sebagai indikator pembandingan antara dua jenis proyek dengan skema pembiayaan yang berbeda. Indikator analisis biaya manfaat dan sosial menunjukkan KPBU Jalan Tol Serpong-Balaraja yang menggunakan pembiayaan konvensional memberikan *return* pembiayaan lebih besar, sedangkan Indikator analisis keuangan (*discounted payback period*) menunjukkan bahwa KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan yang menggunakan pembiayaan syariah memiliki waktu pengembalian pembiayaan lebih cepat. Berdasarkan besaran *margin*-nya, KPBU Jalan Tol Serpong-Balaraja lebih efektif, namun berdasarkan waktu pengembalian pembiayaan, KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera Selatan lebih efektif.
2. Dalam meningkatkan jumlah pembiayaan syariah dalam pembangunan infrastruktur dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, lembaga keuangan syariah dihadapi dengan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber dana pembiayaan, pemahaman mengenai perbedaan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional, tingkat *margin* yang tinggi, dan skema syariah yang masih asing dalam proyek infrastruktur. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, dilakukan upaya seperti melakukan pembiayaan sindikasi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah

lain, menerbitkan produk *Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA)*, mempertimbangkan untuk memperbarui regulasi mengenai adanya persyaratan permohonan ahli syariah di tahap awal penyiapan dokumen atau tahap *feasibility study*, melakukan negosiasi agar penetapan *margin* lebih fleksibel, dan mengedepankan *elite value* yang dimiliki oleh skema syariah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan pada penelitian di atas, maka terdapat saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Untuk lembaga keuangan syariah, disarankan untuk melakukan langkah strategis dalam mengembangkan instrument investasi syariah seperti sukuk dengan menerapkan sukuk dalam tingkat pemerintah provinsi. Karena pada saat ini sukuk pemerintah baru diterapkan pada tingkat nasional.
2. Untuk pemerintah, disarankan untuk membuat regulasi atau payung hukum khusus yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi pembiayaan syariah pada skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Karena pada saat ini pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional dalam KPBU menggunakan regulasi yang sama.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai pembiayaan syariah dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan memfokuskan sudut pandang lain seperti analisa penerapan prinsip syariah, kinerja keuangan proyek dengan pembiayaan syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat investor dalam membiayai proyek KPBU syariah, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan KPBU berbasis syariah.



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi Pada Desa Latawaro Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara). 63-64.
- Ardapela, N. (2023). Keadilan Dalam Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia. *IBLAM LAW REVIES*, 165-166.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *INNOVATIVE: Journal Of Sosial Science Research Vol.3, No.2*, 4.
- Badan Kebijakan Fiskal. (n.d.). *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*. Retrieved from [fiskal.kemenkeu.go.id: https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Strategi%20Menjaga%20Kesinambungan%20Fiskal%20Jangka%20Panjang.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Strategi%20Menjaga%20Kesinambungan%20Fiskal%20Jangka%20Panjang.pdf)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *KBBI VI Daring*. Retrieved from [kbbi.kemdikbud.go.id: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerjasama](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerjasama)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *KBBI VI Daring*. Retrieved from [kbbi.kemdikbud.go.id: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019, Agustus 14). *PPN/Bappenas*. Retrieved from [perpustakaan.bappenas.go.id: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP\\_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/perpustakaan.bappenas.go.id: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023, Mei). *PPN/Bappenas*. Retrieved from [perpustakaan.bappenas.go.id: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit\\_Kerja/Direktorat%20Pengembangan%20Pendanaan%20Pembangunan/PPP%20Book%202023.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/perpustakaan.bappenas.go.id: https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Unit_Kerja/Direktorat%20Pengembangan%20Pendanaan%20Pembangunan/PPP%20Book%202023.pdf)
- Buana, M. T., & Halim, S. (n.d.). Konsep Solusi Keuangan Syariah Bagi Perusahaan Konstruksi Infrastruktur Di Indonesia - Studi Kasus Konstruksi Jalan. *Liquidity - Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Vol.10 No.1*, 10.
- Cahyani, N., & Yastika, L. (2020). Analisis Pembiayaan Non-Anggaran Pemerintah Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur Vol.6, No.2*, 11.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Casnoto, H. (2019). Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur pada Daerah Otonom melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Studi pada Pemerintah Kota Bandung). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 3.0*, 7.
- Daliman, Herman, & Purwanti, O. (2021). Analisis Penilaian Risiko Program Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada Infrastruktur Jalan Tol. *RekaRacana : Jurnal Teknik Sipil Vol.7, No.01*, 30.
- Ekowati, T., Prasetyo, E., Sumarjono, D., & Setiadi, A. (2016). *Buku Ajar Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek*. Semarang: Media Inspirasi Semesta.
- Fakhri, M. (2019). Analisis Potensi dan Risiko Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol Berbasis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi ISTP Vol.11, No.01*, 8.
- Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Infrastruktur Nasional Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Program SDGs. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Vol.5 No.2*, 178.
- Herawati, L., & Hayati, R. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Tantarigin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalog. *Jurnal STIA Tabalog Volume 3 Nomor 2*, 860.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, Agustus 31). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved from [setkab.go.id: https://setkab.go.id/peringkat-daya-saing-indonesia-naik-ke-posisi-34/](https://setkab.go.id/peringkat-daya-saing-indonesia-naik-ke-posisi-34/)
- Ilmia, A. (2020). Sukuk Negara dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management Vol.1, No.2*, 32-33.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2024). *KPBU - Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha*. Retrieved from KPBU: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/73-220/umum/kajian-opini-publik/efisiensi-kpbu-dalam-penyediaan-infrastruktur>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *KPBU - Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha*. Retrieved from KPBU: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1160-1476/umum/kajian-opini-publik/global-infrastructure-hub-gih-dan-penyediaan-infrastruktur>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan*. Retrieved from [kpbu.kemenkeu.go.id: https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1597/progres-konstruksi-proyek-jalan-tol-serpong-balaraja-seksi-1b](https://kpbu.kemenkeu.go.id/berita/read/1597/progres-konstruksi-proyek-jalan-tol-serpong-balaraja-seksi-1b)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). *Laporan Badan Pengatur Jalan Tol Serpong-Balaraja*. Jakarta.
- Khairunnisa, N., Furqani, H., & Amanatillah, D. (2017). Sukuk dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia (Analisis Peran dan Manfaat Sukuk Untuk Pembangunan Indonesia) . *EKOBIS : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol.1, No.2*, 27.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019, Desember). Retrieved from kneks.go.id: <https://kneks.go.id/storage/upload/1583203339-Concept%20Note%20Sharia%20Restricted%20Intermediary%20Account%20%28SRRIA%29.pdf>
- Kurniawan, R. (2019). Analisis Studi Kelayakan Keuangan Sentra Peningkatan Performa Olahraga Indonesia (SP2OI) Di Menara Mandiri. *FAIRVALUE: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN Vol.2, No.1*, 25.
- Lestari, V. D. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 5 No. 1*, 51.
- Lukman. (2017). ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT SUMATERA BARAT. *scholar unand*, 3.
- Maramis, J. (2018). Faktor Faktor Sukses Penerapan KPBU Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur : Suatu Kajian. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi Vol.5, No.1*, 62-63.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nainggolan, N. T., Mawati, A. T., Gandasari, D., Ardiana, D. P., Purba, B., Kato, I., . . . Simarmata, M. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nawawi, H. (2014). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Novriawan, H. Y. (2022). Pengaruh Kinerja Kepala Daerah Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. *Digilib Unila*, 21.
- Nurachmad, M. (2018). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. *Lex.Jurnalica Volume 15 Nomor 2*, 115.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *OJK*. Retrieved from ojk.go.id: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Kebijakan-Pengembangan-dan-Roadmap-.aspx>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Patu, A. S., & Akhmadi, M. H. (2021). Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol.16, No.2, 13.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020.* (2020). Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011.* (2011). Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016.* (2016). Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2020.* (2020). Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015.* (2015). Indonesia.
- Pribadi, Y. (2020). Pemanfaatan Sukuk untuk Pembiayaan Proyek Infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.8, No.2, 8.*
- Pricewaterhousecoopers. (2017). *The Long View How will the global economic order change by 2050.* PwC: Audit and assurance, consulting and tax services.
- PT.PII. (2020, Agustus 03). *PT.PII Penjaminan & Infrastruktur.* Retrieved from <https://www.ptpii.co.id/pt-pii-berikan-penjaminan-pada-proyek-preservasi-jalan-lintas-timur-sumatera-selatan>
- PT.Sarana Multi Infrastruktur. (2021, Desember 31). Retrieved from [ptsmi.co.id: https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/financial-statement/laporan-keuangan-reissued-pt-smi-2021.pdf](https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/financial-statement/laporan-keuangan-reissued-pt-smi-2021.pdf)
- PT.Sarana Multi Infrastruktur. (2023, Desember 31). Retrieved from [ptsmi.co.id: https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/financial-statement/sarana-multi-infrastruktur-persero-des-2023-released.pdf](https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/financial-statement/sarana-multi-infrastruktur-persero-des-2023-released.pdf)
- Puspitasari, M. (2022). Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2. *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol.2 No.3, 213.*
- Rizal, A., Shadiq, T. F., & Thoyib, M. (2022). Analisis Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Model Build and Transfer Pada Upaya Eskalasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja. *Perspektif : Jurnal Ilmu Administrasi Vol.4, No.1, 8.*
- Rosita, & Saptomo, Y. H. (2023). Analisis Investasi dan Kelayakan Usaha Pada PT.Warmare Jaya Mandiri (WJM) Manokwari Selatan. *JURNAL MANEKSI VOL 12, NO. 4., 867.*
- Setiajatnika, E., Gunadi, T., & Nugraha, H. (2023). Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penerangan Jalan (APJ). *Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen Vol.14 No.2*, 317.

Setiawan, P. (2021). Pengambilan Keputusan Manajemen Untuk Mengganti Mesin Press Di Rumah Kreasi Production. *e-journal uajc*, 17.

Sidauruk, D. (2018). ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI MENGGUNAKAN METODA DISCOUNTED CASH FLOW TAMBANG GALENA PT.TRIPLE EIGHT ENERGY, KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang*.

The World Bank. (2017). *Mobilizing Islamic Finance For Infrastructure Public-Private Partnership Report 2017*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Retrieved from [ppp.worldbank.org](http://ppp.worldbank.org).

Tyahardi, T., Kusnendi, & Cakhyaneu, A. (2021). Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konstruksi Di Indonesia Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Vol.13, No.1*, 15.

Yuliani, A. E., Fitrijanti, T., & Sari, P. Y. (2020). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.7, No.12*, 2372.

Zulkarnain, M. F. (2017). Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah - FISIP Universitas Hasanuddina*, 85.

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Wawancara

1. Apa Peran/tugas/fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam KPBU?
2. Bagaimana regulasi yang mengatur pembiayaan syariah dalam KPBU?
3. Bagaimana maksud dari kesesuaian suatu proyek dengan RPJMN?
4. Apakah jenis pembiayaan yang digunakan dalam proyek KPBU mempengaruhi kesesuaian dengan RPJMN?
5. Bagaimana maksud dari kesesuaian suatu proyek dengan RTRW?
6. Apakah jenis pembiayaan yang digunakan dalam KPBU mempengaruhi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah?
7. Bagaimana keterkaitan antar sektor infrastruktur dalam suatu proyek KPBU?
8. Bagaimana cara melakukan analisis biaya manfaat dan sosial dalam KPBU?
9. Bagaimana perhitungan payback period dalam KPBU menggunakan pembiayaan syariah?
10. Apa saja hal yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan penggunaan pembiayaan syariah atau pembiayaan konvensional?
11. Apakah ada perbedaan dalam pembiayaan syariah dan konvensional dari sisi pelaksanaannya?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam KPBU dengan pembiayaan syariah?
13. Seperti apa implementasi pembiayaan syariah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha?
14. Dalam perhitungan analisis investasi dan waktu pengembalian dana, siapakah yang membuat rincian perhitungannya?
15. Apabila margin pembiayaan syariah dianggap terlalu tinggi apakah bisa bank syariah menurunkan margin nya?
16. Secara regulasi, apakah ada perbedaan antara pembiayaan dengan skema syariah atau skema konvensional?
17. Berdasarkan waktunya, apakah ada perbedaan antara pembiayaan dengan skema syariah atau skema konvensional?
18. Bagaimana perencanaan pembiayaan dalam proyek infrastruktur?



Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Nama : 1. Raden An'an Andri Hikmat SR, AP, MM  
 2. Mirni Sumiyati S.E., M.S.E  
 3. Herteti Rospelita, S.Kom, M.Si  
 4. Watok V Worang, S.E

Tanggal : 23 Juli 2024

Lokasi : Gedung H, Kementerian Dalam Negeri

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri:

1. Pertanyaan : Apa Peran/tugas/fungsi Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Pendapatan Daerah dalam KPBU?

Proyek KPBU ada yang merupakan proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di Kementerian Dalam Negeri lebih memfokuskan kepada proyek pemerintah daerah. Antara proyek pusat dan daerah tersebut secara garis besar nya sama, namun yang membedakan adalah PJPK nya. Pada proyek pusat, yang menjadi PJPK adalah Menteri atau Kepala Lembaga, sedangkan proyek daerah yang menjadi PJPK adalah Kepala Daerah dimana lokasi proyek itu berada.

2. Pertanyaan : Bagaimana regulasi yang mengatur mengenai pembiayaan syariah dalam KPBU?

Secara regulasi, antara pembiayaan syariah dengan konvensional tidak ada perbedaannya karena semua tahapan pelaksanaannya sama saja. Dalam KPBU yang menggunakan pembiayaan syariah, KNEKS memiliki peran dalam membantu pengembangannya dan melakukan pengawasan. Sedangkan pada KPBU dengan pembiayaan konvensional, tidak ada campur tangan KNEKS.

3. Pertanyaan : Apakah jenis pembiayaan yang digunakan dalam proyek KPBU mempengaruhi kesesuaian dengan RPJMN?

Keputusan menggunakan pembiayaan syariah atau konvensional tidak mempengaruhi terhadap kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD. Untuk proyek pemerintah daerah biasanya tergantung dengan Kepala Daerah nya, apakah mau menggunakan pembiayaan syariah maupun konvensional, untuk proyek pemerintah

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pusat tergantung dengan PJK nya masing-masing. Selama adanya proyek tersebut tidak melenceng dari rencana pembangunan yang ada, maka itu tidak masalah. Untuk daerah seperti Nanggroe Aceh Darussalam, pembiayaan yang dipilih oleh Kepala Daerah adalah pembiayaan syariah karena pemerintah daerah nya berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam.

4. Pertanyaan : Apakah jenis pembiayaan yang digunakan dalam KPBU mempengaruhi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah?

Sama seperti kesesuaian dengan RPJMN, selama proyek tersebut sesuai maka sumber dana menggunakan skema syariah ataupun konvensional tidak menjadi masalah. Untuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah ini berbeda-beda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Proyek yang menjadi objek penelitian berada di wilayah provinsi Sumatera Selatan dan Banten, maka perencanaan Tata Ruang dan Wilayahnya itu berbeda.

5. Pertanyaan : Bagaimana keterkaitan antar sektor infrastruktur dalam suatu proyek KPBU?

Keterkaitan antar sektor infrastruktur ini *multiplier effect* yang pengaruhnya meluas. Jika infrastruktur baru terbangun atau tersedia, secara logika nya akan memberi pengaruh terhadap perekonomian di lokasi tersebut dan juga sekitarnya. Namun belum terlihat pengaruh yang signifikan, karena hasilnya akan dapat dirasakan secara bertahap. Untuk melihat pengaruh dapat juga dilakukan dengan melihat pendapatan daerah di lokasi tersebut.

6. Pertanyaan : Bagaimana cara melakukan analisis biaya manfaat dan sosial dalam proyek KPBU?

Ini seperti *cost benefit analysis*, jika dalam proyek KPBU pemerintah pusat seperti yang dijadikan objek penelitian, analisis *cost benefit*-nya secara rinci dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Analisis ini berhubungan dengan analisis *Value for money* yang di awal proses perencanaan. Pada biaya manfaat dan sosial proyek KPBU, biaya di perhitungkan dapat bertambah jika PJK memutuskan untuk menggunakan penjaminan pemerintah lewat lembaga penjamin yaitu PT.Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT.PII). Lembaga penjamin ini sama seperti asuransi konsepnya memerlukan premi, sehingga akan menambah perhitungan biaya yang akan dikeluarkan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Pertanyaan : Bagaimana perhitungan payback period dalam KPBU menggunakan pembiayaan syariah?

*Payback period* pada proyek infrastruktur cenderung panjang karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Saat akan dilakukan *financial close* akan dicari *lender* yang dapat memberikan pembiayaan, baik syariah atau konvensional. Untuk dapat dipilih sebagai *lender* yang bekerjasama, *lender* pembiayaan syariah cenderung membuat perhitungan keuangan dalam jangka waktu yang lebih panjang yang disebabkan oleh *margin* pembiayaan syariah yang lebih tinggi daripada pembiayaan konvensional. Hal ini dilakukan oleh *lender* pembiayaan syariah agar kewajiban pengembalian investasi per-periodenya dapat bersaing dengan pembiayaan konvensional.

8. Pertanyaan : Apa saja hal yang menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan penggunaan pembiayaan syariah atau pembiayaan konvensional?

Dalam KPBU, letak perbedaan antara pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional terdapat pada akad dan juga besaran *margin* syariah atau bunga konvensional. Dari sisi Kementerian Dalam Negeri, keputusan penggunaan pembiayaan dilakukan dengan menimbang perhitungan yang memberikan keuntungan lebih besar. Besaran kewajiban dalam pengembalian pembiayaan yang dipengaruhi oleh tingginya *margin* syariah dibandingkan bunga konvensional seringkali menjadi alasan tidak digunakannya pembiayaan syariah.

9. Pertanyaan : Apakah ada perbedaan dalam pembiayaan syariah dan konvensional dari sisi pelaksanaannya?

Tahap KPBU dengan pembiayaan syariah atau pembiayaan konvensional tidak ada perbedaannya baik dari tahap persiapan, tahap perencanaan, hingga tahap pengoperasian sehingga waktu yang dibutuhkan juga sama karena perbedaannya hanya pada adanya akad.

10. Pertanyaan : Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam KPBU dengan pembiayaan syariah?

Pembiayaan syariah cenderung lebih mahal karena margin yang lebih besar dan masih banyak pembuat keputusan yang berfikir bahwa pembiayaan syariah sama saja seperti pembiayaan konvensional dimana dirasa bahwa pemberi pembiayaan hanya menginginkan keuntungan semata. Upaya yang dapat dilakukan

untuk menghadapi kendala biaya yang lebih mahal adalah melakukan negosiasi besaran bagi hasil atau *margin*-nya. Belum lama ini dilakukan pertemuan yang kita diminta untuk memberikan pertimbangan, saat ini lagi disusun peraturan baru yang masih *draft*, jadi belum bisa untuk kita *share*. Ada sedikit penambahan mengenai adanya permohonan ahli syariah di tahap awal penyiapan dokumen, sebelumnya ahli syariah baru di *hire* saat udah ada keputusan mau memilih pembiayaan syariah.



### © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nama : Yosita Nur Wirdayanti, ST, MBA., MIFP  
 Jabatan : Deputy Direktur Perbankan Syariah  
 Tanggal : 26 Juli 2024  
 Lokasi : Gedung Djoeanda II Kementerian Keuangan

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Deputy Direktur Perbankan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah :

1. Pertanyaan : Seperti apa implementasi pembiayaan syariah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha?

Di PPP Book 2023, ada 11 yang syariah dan 5 proyek pupr yang tidak masuk *ppp book*, total 16 proyek KPBU syariah dengan nilai pembiayaan 20,35 triliun. Ada 2 pihak yang terlibat dan menyetujui dalam keputusan memilih pembiayaan dengan skema apa, yang pertama pihak BUP atau perusahaan konstruksi dan pihak keuangan syariah. Dari sisi BUP, preferensi nya memilih harga yang paling kompetitif, artinya secara *pricing* masuk dan secara prosesnya cepat dan mudah, artinya secara administrasi tidak banyak dokumen atau hal hal yang harus dipenuhi. Dari sisi bank syariah/ lembaga keuangan syariah, kalo menurut saya dari beberapa hasil diskusi. Bank syariah saat ingin menyalurkan pembiayaan harus berdasarkan prinsip 5C. Kemudian bank syariah akan mengecek risiko dari si perusahaan pemenang lelang/ BUP, lalu mengecek proyeknya apakah secara bank *capability*-nya masuk atau nggak.

Ada 2 jenis cara pengembalian pembiayaan dalam KPBU ini, *User charge* dan *avaibility payment* (AP). Bank syariah secara *general* lebih memilih pengembalian *avaibility payment* karena lebih pasti dan risiko *demand* nya kecil, hanya perlu memastikan bahwa BUP yang menang akan *perform* sesuai dengan *terms and conditon* yang di *assign* oleh PJPK, karena jika BUP nya *perform* maka AP nya akan dibayar 100%, tapi klo BUP hanya *perform* 80%, berarti hanya dibayar AP nya 80%. Makanya bank syariah lebih memilih AP untuk memitigasi risiko nya. Lalu dari *size* proyek, jika dilihat dari kondisi bank syariah, modalnya *relative* lebih kecil dibandingkan konvensional, yang masuk ke buku 3 aja hanya 1 bank, dan

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sisanya hanya buku 2 dan buku 1. Berarti maksimal yang bisa diberikan untuk membiayain proyek KPBU itu lebih kecil dari konvensional. Kemudian juga dari sisi BUP ada *concern* masalah akses, BUP ini mungkin sebelumnya lebih *familiar* dengan konvensional, udh pernah transaksi atau dapet pembiayaan dari konvensional sehingga jika merasa nyaman dan tidak ada masalah, kenapa harus ganti, sehingga bank syariah harus datang dengan *elite value* yang lebih agar bisa meyakinkan mereka untuk menggunakan syariah. Kemudian dari sisi *capability*, misalnya pengalaman dari bank, apakah bank tersebut sudah *familiar* dengan *project finance* atau apakah sebelumnya pernah membiayai pembiayaan infrastruktur. Jika belum sama sekali, maka kemungkinan bank untuk membiayai infrastruktur juga lebih kecil. Lalu juga sekmen bisnis, meskipun bank syariah ada 32 BUS dan UUS, tidak semuanya masuk sekmen korporasi, misalnya BTPN itu kan sekmen nya mikro sehingga bukan sekmen nya untuk masuk sana, sama juga seperti bank aladin dan bank jago. Yang masuk kesana mungkin bank-bank besar, UUS, atau juga BPD yang memiliki *appetite* kesana. Selain itu SMI, dia juga punya UUS. UUS ini juga membiayai KPBU seperti Jalintim sumatera dan PP semarang-demak karena SMI sebagai *development bank* fokus nya memang ke arah sana.

2. Pertanyaan : Dalam perhitungan analisis investasi dan waktu pengembalian dana, siapakah yang membuat rincian perhitungannya?

Tarif yang tawarkan oleh bank syariah itu merupakan rincian yang dibuat oleh bank syariah. Lalu tarif tersebut diberikan kepada BUP yang sedang mencari *lender*.

3. Pertanyaan : Apabila margin pembiayaan syariah dianggap terlalu tinggi apakah bisa bank syariah menurunkan *margin* nya?

Tergantung dengan kondisi bank syariah itu sendiri. Misalnya bicara perbankan, dia merupakan lembaga *intermediary*, dia akan menghimpun dan menyalurkan dana. Misalnya dana yang dihimpun merupakan dana yang menginginkan bagi hasil yang tinggi, berarti dia mesti menyalurkan pembiayaan dengan *rate* yang tinggi juga. Misalnya dia menyalurkan bagi hasil yang rendah, maka *rate* bagi hasil kepada deposan nya juga rendah. Misalnya bank kasanya



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tinggi, banyak tabungan dan banyak giro, maka dia bisa menurunkan *pricing* karena ekspektasi dari depositnya itu ga tinggi, berarti dia bisa menurunkan persentase *margin*. Karena dari data historis, ekspektasi nasabah hanya sekian persen. Untuk bank- bank yang lebih kecil atau lebih banyak depositnya dalam bentuk deposito, pasti ekspektasinya akan tinggi, ketika harus menurunkan *margin* maka akan dilihat apakah menguntungkan, apakah bagi hasil ke nasabah, nasabahnya akan pindah apa tidak karena nasabah dana lebih gampang pindah. Jadi kembali lagi ke banknya, tergantung *cost of fundnya*, *risk premium* nya berapa, dan biaya operasionalnya berapa.

4. Pertanyaan : Secara regulasi, apakah ada perbedaan antara pembiayaan dengan skema syariah atau skema konvensional?

Tidak ada *issue* harus menggunakan skema apa, karena pada regulasinya pemerintah hanya mengatur sisi PJKP dan BUP, maksudnya sampai penunjukkan BUP dan *financial close*. Pemerintah tidak membatasi BUP dapat uang darimana, misalnya dari bank syariah, bank konvensional, atau *full* dari modalnya dia. Misalnya BUP modalnya kuat maka hanya dari *equity*-nya dia juga sudah bisa memenuhi kebutuhan biaya secara keseluruhan. Misalnya BUP punya investor luar negeri, berarti tidak perlu pembiayaan dari bank. Pemerintah membebaskan. cuma memang pada proses KPBU itu ada perjanjian pembangunan proyek antara PJKP dan BUP, kemudian perjanjian penjaminan antara BUP, PT.PII dan PJKP, dan perjanjian pembiayaan antara BUP dan lembaga keuangan. Lembaga penjaminan secara syariah belum *comply* karena ada perjanjian regres, perjanjian regres itu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010, dalam penghitungan regres mempertimbangkan *time value of money* yang tidak sesuai dengan syariah, namun saat ini masih tidak masalah karena penjaminan itu tidak langsung dengan ke bank syariah. Perjanjian penjaminan itu antara PJKP, BUP, dan PT.PII. Sehingga saat ini masih diperbolehkan karena bank syariah perjanjian nya langsung ke BUP.

Ada aspirasi KPBU dengan implementasi prinsip syariah, seperti di Aceh yang memiliki *Qonun*, jadi di Aceh ada KPBU tahun 2018 untuk rumah sakit, memang pemerintah nya mau KPBU dengan skema syariah karena adanya *Qonun* tersebut. Ketika itu PJKPnya *request* ke PT.PII, supaya penjaminannya dengan

skema syariah. Dari *end to end* itu dengan skema syariah, Cuma sayangnya karena belum ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif di aceh hingga saat ini, maka proyek tersebut belum sampai lelang, jadi dia baru sampai FS, kemudian sudah ada juga bantuan dukungan pemerintah, namun belum kejadian karena belum ada kesepakatan tersebut.

5. Pertanyaan : Berdasarkan waktunya, apakah ada perbedaan antara skema syariah dengan skema konvensional?

Kalo dari pembiayaan syariah sama aja, prosesnya sama aja dalam artian, bank sama sama akan melakukan analisa, verifikasi dokumen.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri

Nama : Nasrun, SH

Jabatan : Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah.

Tanggal : 26 Juli 2024

Lokasi : Kediaman

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri:

1. Pertanyaan : Bagaimana maksud dari kesesuaian suatu proyek dengan RPJMN?

Kesesuaian proyek dengan RPJMN itu jika manfaat atau dampak dari proyeknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam RRPJMN. RPJMN kan perencanaannya dalam 5 tahun, nantinya di *breakdown* pertahun untuk apa dan tahun selanjutnya untuk apa, proyek tersebut bisa dilihat termasuknya di mana. Sumber pendanaan proyeknya darimana, ada di UU APBN, misalnya APBN murni, pinjaman, atau KPBU. Untuk mewujudkan visi dan misi presiden, ditunjuk organisasi atau kementerian dalam melaksanakannya. Visi misi ini dituangkan dalam RPJMN. Dalam pertahun, targetnya berapa ada di dalam RKP. Target tersebut akan dibahas dengan dewan mengenai anggarannya, jika sudah disetujui, baru di masukkan dalam UU APBN.

2. Pertanyaan : Bagaimana maksud dari kesesuaian suatu proyek dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah?

RTRW itu mengikuti RPJMN, agar pembangunan atau perencanaan di suatu wilayah tidak semau-maunya pemerintah daerah. Misalnya di daerah Tangerang Selatan sudah di tentukan sebagai kawasan perumahan, tidak boleh dibangun sawah atau pabrik. Jadi apa yang sudah tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah berarti sudah dipertimbangkan matang-matang untuk diwujudkan.

3. Pertanyaan : Bagaimana perencanaan pembiayaan dalam proyek infrastruktur?

Proyek seperti pembangunan jalan tol sudah ada perencanaannya di Bappenas sejak awal, ingin menggunakan sumber biaya darimana. Jika proyek besar seperti jalan toll sepenuhnya di tanggung oleh APBN atau APBD pasti tidak



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

cukup. Sumber biayanya bisa pinjaman dari dalam negeri seperti bank, PT.SMI, atau pinjaman luar negeri. Dalam hal pinjaman luar negeri, pemerintah daerah tidak bisa meminjam secara langsung, harus lewat negara melalui Kementerian Keuangan. Setelah uang pinjaman dari luar negeri masuk ke dalam APBN, barulah pemerintah daerah membuat perjanjian dengan Kementerian Keuangan. Perjanjian mengenai pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjamannya. Biasanya bunganya lunak.

4. Pertanyaan : Bagaimana keterkaitan dengan sektor-sektor infrastruktur lainnya?

Pinjaman diutamakan untuk sesuatu yang menambah pendapatan seperti jalan toll. Dalam sekian tahun, sudah tau akan untungnya dan juga *effect* nya bisa dirasakan oleh sektor lain. Sehingga pemerintahan saat ini banyak membangun jalan toll agar mengurangi beban negara dengan menggunakan KPBU, Obligasi, atau Sukuk.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber



Dokumentasi saat wawancara dengan Narasumber Direktorat Pendapatan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan narasumber di Direktorat  
Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan narasumber Ibu Yosita Wirdayanti Deputy Direktur Perbankan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



Dokumentasi setelah melakukan wawancara dengan narasumber di kediaman pribadi narasumber.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Surat Permohonan Penelitian untuk Melaksanakan Wawancara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor : 4859/PL3/PK.01.09/2024

16 Juli 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan  
Direktorat Pendapatan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
Jl. Veteran No.7, Gambir  
Jakarta Pusat, Indonesia 10110

Salam sejahtera. Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam rangka penyusunan penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang "Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah".

Berikut daftar nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1	Nessy Cintiara Zulni	20044111014	D4 Keuangan dan Perbankan Syariah

Adapun rencana pelaksanaan observasi pada **22 Juli s.d. 26 Juli 2024**. Untuk informasi lebih lanjut mohon dapat menghubungi kami melalui email [akuntansi@pnj.ac.id](mailto:akuntansi@pnj.ac.id) untuk kesediaanya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan  
u.b.  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002

Tembusan:

- 1 Direktur;
- 2 Wakil Direktur Bidang Akademik;
- 3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum;  
Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor : 4860/PL3/PK.01.09/2024

16 Juli 2024

Hal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir**

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Gedung Djuanda II Lantai 17  
Jalan Wahidin No.1, Jakarta 10710

Salam sejahtera. Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam rangka penyusunan penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tentang **"Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah"**.

Berikut daftar nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1	Nessy Cintia Zulmi	2004411014	D4 Keuangan dan Perbankan Syariah

Adapun rencana pelaksanaan observasi pada **22 Juli s.d. 26 Juli 2024**. Untuk informasi lebih lanjut mohon dapat menghubungi kami melalui email [akuntansi@pnj.ac.id](mailto:akuntansi@pnj.ac.id) untuk kesediaannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan  
u.b.  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002

Tembusan:

- 1 Direktur;
- 2 Wakil Direktur Bidang Akademik;
- 3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum;  
Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor : 4861/PL3/PK.01.09/2024

16 Juli 2024

Hal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi/Tugas Akhir**

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan  
Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah  
Kementerian Dalam Negeri  
Jl. Veteran No.7, Gambir  
Jakarta Pusat, Indonesia 10110

Salam sejahtera. Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam rangka penyusunan penelitian Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Bersama ini kami mohon izin agar mahasiswa/i terlampir dapat melaksanakan penelitian/observasi di Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang **"Efektivitas Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Menggunakan Pembiayaan Syariah"**.

Berikut daftar nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Prodi
1	Nessy Cintia Zulni	2004411014	D4 Keuangan dan Perbankan Syariah

Adapun rencana pelaksanaan observasi pada **22 Juli s.d. 26 Juli 2024**. Untuk informasi lebih lanjut mohon dapat menghubungi kami melalui email [akuntansi@pnj.ac.id](mailto:akuntansi@pnj.ac.id) untuk kesediaanya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan  
u.b.  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.  
NIP. 196404151990032002

Tembusan:

- 1 Direktur;
- 2 Wakil Direktur Bidang Akademik;
- 3 Kepala Bagian Keuangan dan Umum;  
Politeknik Negeri Jakarta